

Volume 5 | No.2 | Edisi : Juli - Desember 2016

# JURNAL

# *Kompetitif*



**FAKULTAS EKONOMI**  
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif	Vol. 5	No. 2	Hal: 1- 150	Palembang, Juli 2016	ISSN: 2302 - 4585
------------	--------	-------	-------------	----------------------	-------------------

# KOMPETITIF

---

## Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

---

- Analisis Motivasi Dan Disiplin Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada CV Graha Indah Sari Palembang  
Hj. Akila, SE.M.M \_\_\_\_\_ 1-16
- Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  
Frecilia Nanda Melvani, SE.MM \_\_\_\_\_ 7-32
- Pengaruh Harga, Distribusi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Di PT SmartFren Tbk Palembang  
Herman Efrizal, SE.MM \_\_\_\_\_ 33-41
- Pengaruh Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja UMKM di Palembang  
Lusia Nargis, SE.MSi \_\_\_\_\_ 42-52
- Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Smartphone Oppo Di Area Internasional Plaza Palembang.  
Dra Yasmina Martini, SE.MM \_\_\_\_\_ 53-64
- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyuasin  
Dwi Septa Aryani, SE.Ak.MSi.CA, Nabila, SE \_\_\_\_\_ 65-76
- Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT Sinarmas Multifinance Palembang  
Muhammad Imam Tohari, Muhammad Ridwan, SE.MM \_\_\_\_\_ 77-89
- Pengaruh DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan  
Endang Sri Mulatsih, SE.M.Si \_\_\_\_\_ 90-112
- Pengaruh *Corporate social Responsibility Goal*, *Corporate Social Issue*, dan *Corporate Relation Program* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Kota Pagaralam  
Msy Mikial, SE.Ak.MSi.CA, Kusminaini Armin, SE.MM, Anggara A.P \_\_\_\_\_ 113-131
- Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Wom Finance Tbk Palembang  
Nina Fitriana, SE.MSi, Umi Hasanah, SE.MM, Ria Oktavia \_\_\_\_\_ 132-150

**PENGARUH DAU, DAK, JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH  
TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**Endang Sri Mulatsih\*)**

---

**ABSTRACT**

*This research aimed to analyze the influence of General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Population and the landmass of the regional capital expenditure district/city in South Sumatra province. Data in this research is regional Government Budget at 15 districts/cities in South Sumatra province in 2012-2013 time period. Model analysis in this research is using multiple regression. It can be seen that in total General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Population and the landmass has positive effect to capital expenditure in district/city in Sumatra Selatan Province, meanwhile partially General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Population has no effect to capital expenditure but the landmass has positive effect.*

**Keywords:** *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, population, the landmass and Capital Expenditure*

**A. PENDAHULUAN**

Sejak berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangannya sendiri. Bentuk perwujudan otonomi daerah adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrument kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam APBD termuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia baik yang didapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah dan retribusi daerah. (DJPK, 2013: iii).

APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan, namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah. Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan Belanja Daerah.

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. (DJPK, 2013:21). Berdasarkan klasifikasi ekonomi

---

\*) Dosen Tetap STIE Mulia Darma Pratama

belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga. Belanja modal adalah pengeluaran untuk keperluan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. (DJP, 2013: vii). Belanja Modal merupakan bagian dari pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain yang syah.

Transfer terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), transfer dari provinsi dan transfer dari pemda lain. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain

dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketigakomponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh (UU No 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembalimengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan

memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. (UU No 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapaistandar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. (UU No 33 Tahun 2004).

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (SAP, 2004). Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu : belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

Belanja Modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Seringkali ditemukan fakta bahwa Realisasi Belanja Modal pada APBD di akhir tahun seringkali di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Disamping itu, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.

Besarnya Belanja Modal juga dipengaruhi besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk adalah sekumpulan orang yang mendiami wilayah

tertentu. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan social di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. (BPS Sumsel, 2015:31). Jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah belanja modal. Jumlah penduduk yang besar memerlukan prasarana dan sarana yang besar dalam menunjang pelayanan publik.

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah

bersangkutan. Provinsi Sumatera Selatan terletak pada  $1^{\circ} - 4^{\circ}$  lintang selatan dan  $102^{\circ} - 106^{\circ}$  bujur timur. Luas wilayah provinsi Sumatera Selatan  $87.017,24 \text{ Km}^2$  dengan batas wilayah sebelah utara provinsi Jambi, sebelah selatan provinsi Lampung, sebelah timur provinsi Bangka Belitung dan sebelah barat provinsi Bengkulu. Saat ini provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. (BPS, 2015:3)

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah bersangkutan. Wilayah yang sangat luas memerlukan belanja Modal yang cukup besar untuk menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan publik.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Meianto (2014) dengan variabel independenya adalah DAU, DAK, PAD dan Luas Wilayah. Dalam penelitian ini Variabel PAD diganti dengan jumlah penduduk. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan penelitian ini adalah:

1. Apakah DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah secara

simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan

2. Apakah DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan

### **Kerangka Pemikiran**

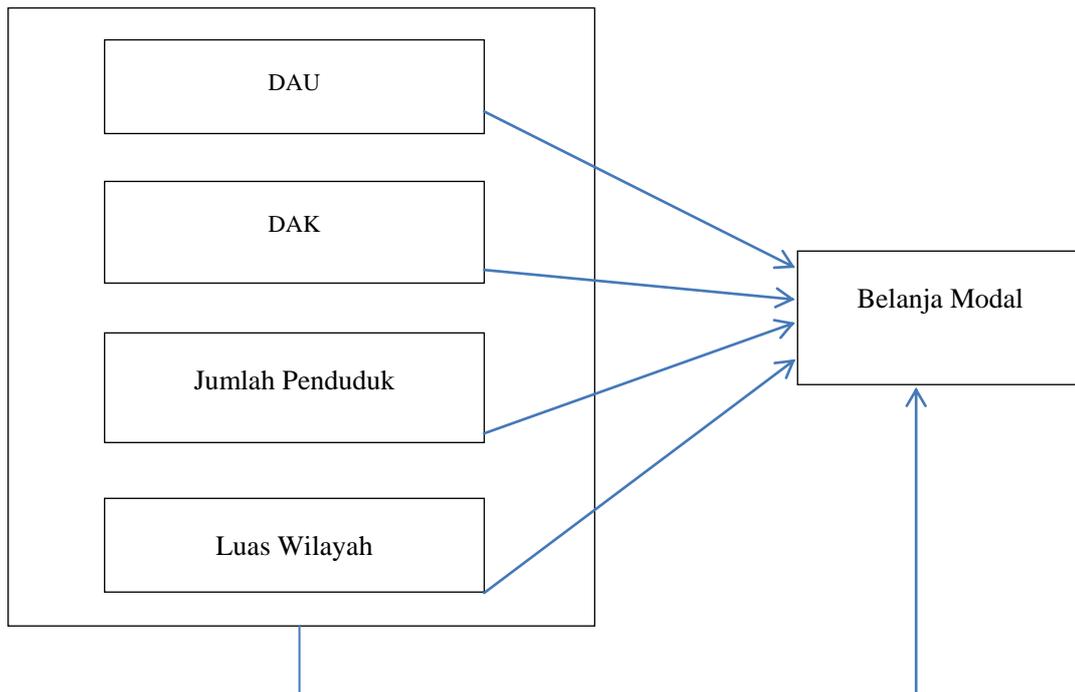
Belanja modal adalah bagian dari pengeluaran daerah dalam rangkapembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Pengeluaran daerah bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain yang syah. Pendapatan Transfer terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dana alokasi khusus), transfer dari provinsi dan transfer dari pemda lain.

Besarnya Belanja Modal juga dipengaruhi besarnya jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah belanja modal. Jumlah penduduk yang besar memerlukan prasarana dan sarana yang besar dalam menunjang pelayanan publik. Demikian juga dengan wilayah yang sangat luas memerlukan belanja Modal yang cukup besar untuk menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan publik.

Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 :Diduga ada pengaruh secara simultan DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan

H2 :Diduga ada pengaruh secara parsial DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas

Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dikategorikan ke dalam jenis penelitian korelasional (*correlational study*) Penelitian korelasional ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari suatu variabel atau lebih terhadap variabel lainnya.

### **2. Populasi, Sampel dan Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan sampelnya adalah 15 Kabupaten/Kota yaitu: Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Prabumulih, Muara

Enim, Lubuk Linggau, Musi rawas, Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Timur(OKU Timur), Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), Ogan Komering Ilir(OKI), Ogan Ilir, Pagar Alam, Lahat dan Empat Lawang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. Adapun data yang diperoleh oleh penulis adalah Realisasi APBD yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Belanja Modal tahun 2012 dan 2013. Data yang diperoleh adalah data yang sudah diolah. Penulis memperolehnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

### 3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

#### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal. Belanja Modal (Y) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan

manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

#### Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Kuas Wilayah.

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_1$ ) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_2$ ) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) adalah sekumpulan orang mendiami wilayah tertentu.
- 4) Luas Wilayah ( $X_4$ ) adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional

#### 4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Uji Normalitas
- b. Uji asumsi klasik yang terdiri dari:; Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi

- c. Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal
- X<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU)
- X<sub>2</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X<sub>3</sub> : Jumlah Penduduk
- X<sub>4</sub> : Luas Wilayah
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub> – b<sub>4</sub> : Koefisien Regresi
- e : Error Terms

- d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik ) dan Uji Signifikansi Parsial (Uji t Statistik) dengan program SPSS 17,0.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Data Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan data penelitian khususnya mengenai perkembangan masing-masing variabel penelitian selama tahun 2012-2013. Tabel 1. di bawah ini adalah data lengkap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 dan Tahun 2013.

**Tabel 1.**  
**DAU, DAK, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2013**

Tahun	Kabupaten/Kota	DAU (Juta Rp)	DAK (Juta Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Hektar)	Belanja Modal (Juta Rp)
2012	Palembang	934.084	36.498	1.503.485	374	21.652
	Musi Banyuasin	327.551	37.402	587.325	14.477	1.045.782
	Banyuasin	631.358	97.453	773.878	12.143	337.733
	Prabumulih	299.642	20.886	169.022	422	188.788
	Muara Enim	580.314	45.218	741.795	8.587	555.453

	Lubuk Linggau	328.282	31.060	208.893	420	162.704
	Musi Rawas	537.624	59.288	543.349	12.136	447.716
	Ogan Komering Ulu	456.823	15.199	338.369	2.918	341.085
	Ogan Komering Ulu Timur	541.449	48.171	628.827	3.356	162.312
	Ogan Komering Ulu Selatan	397.058	41.817	324.836	5.403	268.263
	Ogan Komering Ilir	743.453	82.721	752.906	16.905	381.294
	Ogan Ilir	268.912	25.474	129.719	579	187.087
	Pagar Alam	516.937	58.371	380.398	4.362	247.579
	Lahat	274.671	42.325	225.737	2.256	177.210
	Empat Lawang	446.519	49.789	392.989	2.266	320.096
	Palembang	1.125.008	66.991	1.535.900	374	678.418
	Musi Banyuasin	386.521	51.487	592.400	14.477	1.203.678
	Banyuasin	772.464	147.190	788.300	12.143	561.773
	Prabumulih	352.645	30.854	171.800	422	288.715
	Muara Enim	678.488	46.527	755.800	8.587	864.761
2013	Lubuk Linggau	377.967	31.335	213.000	420	282.058
	Musi Rawas	635.201	97.938	551.500	12.136	564.542
	Ogan Komering Ulu	517.309	20.890	340.000	2.918	341.065
	Ogan Komering Ulu Timur	615.539	59.760	634.700	3.356	244.594
	Ogan Komering Ulu Selatan	459.578	63.527	334.700	5.403	314.962
	Ogan Komering Ilir	844.191	110.790	764.900	16.905	481.994
	Ogan Ilir	316.529	32.269	131.100	579	166.007
	Pagar Alam	566.788	66.064	384.600	4.362	409.290
	Lahat	308.418	54.003	231.700	2.256	251.424
	Empat Lawang	520.288	78.045	398.300	2.266	463.615

Sumber: Diolah dari Realisasi APBD BPS Sumsel dan DJPK Kementerian Keuangan RI

Dari Tabel 1 dapat dilihat DAU tertinggi adalah Kota Palembang terendah adalah Kabupaten Ogan Ilir. DAK tertinggi adalah

Kabupaten Banyuasin dan terendah adalah Ogan Komering Ulu. Jumlah Penduduk tertinggi adalah Kota Palembang dan

terendah adalah Kabupaten Ogan Ilir. Luas Wilayah tertinggi adalah Ogan Komering Ilir dan terendah adalah Kota Palembang. Belanja Modal tertinggi adalah Kabupaten Musi Banyuasin dan terendah adalah Kota Palembang.

## 2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Uji Normalitas

		Belanja Modal	DAU	DAK	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
N		30	30	30	30	30
Normal	Mean	393734.77	528720.37	54968.07	517674.27	5773.60
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	270774.149	203944.356	29487.905	347712.437	5526.494
Most Extreme Differences	Absolute	.177	.108	.142	.168	.202
	Positive	.177	.108	.142	.168	.202
	Negative	-.130	-.106	-.091	-.132	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		.970	.594	.776	.918	1.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.304	.872	.583	.368	.171

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Pada Tabel 3 nilai Asymp.sig (2-tailed) Belanja Modal sebesar 0,304, nilai Asymp.sig (2-tailed) DAU sebesar 0,872, nilai Asymp.sig (2-tailed) DAK sebesar 0,583, nilai Asymp.sig (2-tailed) Jumlah Penduduk sebesar 0,368 dan nilai Asymp.sig (2-tailed) Luas Wilayah sebesar 0,171. Karena signifikansi pada kelima variabel

lebih dari 0.05 jadi dapat dinyatakan data berdistribusi normal.

## 3. Pengujian Asumsi Klasik

### Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi Durbin Watson yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.692 <sup>a</sup>	.479	.396	210439.077	1.392

- a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, DAU, DAK, Jumlah Penduduk
  - b. Dependent Variable: Belanja Modal
- Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 diperoleh nilai DW sebesar 1,392. sedangkan nilai dL sebesar 1,1426 dan dU sebesar 1,7386. Oleh karena nilai DW sebesar 1,392 berada diantara dL dan DU maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut dalam ketidakpastian.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas dengan metode Spearman’s rho yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0.05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas, tetapi jika

signifikansi kurang dari 0.05 maka terjadi masalah heterokedastisitas.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X<sub>1</sub> sebesar 0,936, variabel X<sub>2</sub> sebesar 0,941, variabel X<sub>3</sub> sebesar 0,878 dan variabel X<sub>4</sub> sebesar 0,985. Karena nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

**Tabel 5. Uji Heterokedastisitas**

			Unstandardized Residual	DAU	DAK	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	-.015	.014	.029	.004
		Sig. (2-tailed)	.	.936	.941	.878	.985
		N	30	30	30	30	30
DAU	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.015	1.000	.638**	.869**	.369*
		Sig. (2-tailed)	.936	.	.000	.000	.045
		N	30	30	30	30	30
DAK	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.014	.638**	1.000	.641**	.575**
		Sig. (2-tailed)	.941	.000	.	.000	.001
		N	30	30	30	30	30
Jumlah Penduduk	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.029	.869**	.641**	1.000	.492**
		Sig. (2-tailed)					

	Sig. (2-tailed)	.878	.000	.000	.	.006
	N	30	30	30	30	30
Luas Wilayah	Correlation Coefficient	.004	.369*	.575**	.492**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.985	.045	.001	.006	.
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

### Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan membandingkan nilai  $r^2$  dengan  $R^2$  hasil regresi. Nilai Tolerance DAU 0,123, DAK 0,381, Jumlah Penduduk 0,150 dan Luas Wilayah 0,549 lebih besar dari 0,1 hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Dapat juga

dilihat dari nilai VIF keempat variabel yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Pada Tabel 6 diketahui nilai VIF DAU 8,128, DAK 2,628, Jumlah Penduduk 6,651 dan Luas Wilayah 1,822, maka model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	356854.035	135941.717		2.625	.015		
DAU	-.586	.546	-.441	-1.072	.294	.123	8.128
DAK	-1.263	2.148	-.138	-.588	.562	.381	2.628
Jumlah Penduduk	.434	.290	.557	1.496	.147	.150	6.651
Luas Wilayah	33.162	9.543	.677	3.475	.002	.549	1.822

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

### 4. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Dalam rangka menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan, maka penelitian ini menggunakan sampel 15 Kabupaten/Kota dengan periode

dari tahun 2012 dan 2013 sehingga jumlah datanya (n) adalah 30.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	30	16607	1203678	393734.77	270774.149
DAU	30	274671	1125008	528720.37	203944.356
DAK	30	15199	147190	54968.07	29487.905
Jumlah Penduduk	30	129719	1535900	517674.27	347712.437
Luas Wilayah	30	374	16905	5773.60	5526.494
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Pada Tabel 2 dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi (s) dari masing-masing variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah. Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Belanja Modal.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa n atau jumlah total data pada setiap variabel yaitu 30 buah yang berasal dari 15 sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 dan 2013. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai terendah Rp16,607 M dan nilai tertinggi sebesar Rp1,203678T. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan rendahnya variasi antara nilai tertinggi dan

terendah selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari Belanja Modal.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai terendah Rp.274,671 M dan nilai tertinggi sebesar Rp1,125008T. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai tertinggi dan terendah selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari variabel DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai terendah Rp15,199M dan nilai tertinggi sebesar Rp147,190M. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai tertinggi dan terendah

selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah Penduduk mempunyai nilai terendah 129.719 Jiwaan nilai tertinggi sebesar 1.535.900 Jiwa. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan rendahnya variasi antara nilai tertinggi dan terendah selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari Jumlah Penduduk.

Luas Wilayah mempunyai nilai terendah 374 Hektar dan nilai tertinggi sebesar 16.905 Hektar. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan rendahnya variasi antara nilai tertinggi dan terendah selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari Luas Wilayah.

#### 4. Analisis Regresi Linear

Hasil pengolahan data dengan SPSS versi 17.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	356854.035	135941.717		2.625	.015
DAU	-.586	.546	-.441	-1.072	.294
DAK	-1.263	2.148	-.138	-.588	.562
Jumlah Penduduk	.434	.290	.557	1.496	.147
Luas Wilayah	33.162	9.543	.677	3.475	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

##### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dari Tabel 7 dapat dilihat Model persamaan regresi linear berganda dan hasil analisis yang diperoleh adalah:

$$Y = 356.854,035 - 0,546X_1 - 1,263X_2 + 0,434X_3 + 33,162X_4 + e$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta bernilai positif 356.854,035 hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal sebesar Rp356.854.035.000 jika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah sebesar 0.

- b) Nilai koefisien DAU bernilai negatif 0,546 artinya jika DAU ditingkatkan sebesar 1 rupiah, maka Belanja Modal akan menurun 0,546 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
- c) Nilai koefisien DAK bernilai negative 1,263 artinya jika DAK ditingkatkan sebesar 1 rupiah, maka Belanja Modal akan turun sebesar 1,263 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.
- d) Nilai koefisien Jumlah Penduduk bernilai positif 0,434, artinya jika Jumlah Penduduk meningkat 1

jiwa maka Belanja Modal akan meningkat 0,434 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.

- e) Nilai koefisien Luas Wilayah bernilai positif 33,162 artinya jika Luas Wilayah bertambah 1 hektar maka Belanja Modal akan meningkat 33,162 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.

**b. Hasil Uji Statistik F (Simultan)**

Hasil Uji F digunakan untuk melihat apakah secara simultan variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.019E12	4	2.548E11	5.753	.002 <sup>a</sup>
Residual	1.107E12	25	4.428E10		
Total	2.126E12	29			

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, DAU, DAK, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai F Hitung sebesar 5,753 lebih besar dari nilai F tabel 2,74 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,02. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh

terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2012 dan 2013.

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,692 berarti korelasi Belanja Modal dengan variabel independennya (DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah) tergolong kuat (Sugiyono, 2007).

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 <sup>a</sup>	.479	.396	210439.077

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, DAU, DAK, Jumlah Penduduk

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Koefisien determinasi pada Tabel 9 menunjukkan nilai Adjusted R Square (Adjusted R<sup>2</sup>). sebesar 0,396 atau 39,6% artinya Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah sebesar

39,6% sisanya sebesar 60,4% disebabkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

c. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Hasil Uji statistik t menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel terikat.

**Tabel 10. Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	356854.035	135941.717		2.625	.015
	DAU	-.586	.546	-.441	-1.072	.294
	DAK	-1.263	2.148	-.138	-.588	.562
	Jumlah Penduduk	.434	.290	.557	1.496	.147
	Luas Wilayah	33.162	9.543	.677	3.475	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Berdasarkan Tabel 10 hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung DAU sebesar -1,072 berada di antara t tabel ±2,055 atau dilihat dari nilai sig. lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima, kesimpulannya DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan. Nilai t hitung DAK sebesar -0,588 berada di antara t tabel ±2,055 atau dilihat dari nilai sig. lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima, kesimpulannya DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai t hitung Jumlah Penduduk

sebesar 1,496 berada di antara t tabel  $\pm 2,055$  atau dilihat dari nilai sig. lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima, kesimpulannya Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai t hitung Luas Wilayah sebesar 3,475 berada di daerah penolakan karena lebih besar dari t tabel 2,055 atau dilihat dari nilai sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak, kesimpulannya Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**Pembahasan Temuan Penelitian**  
**Pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Hasil pengolahan data dan analisis statistik regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat disajikan hasil pengujian pada tabel berikut ini:

**Tabel 11. Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Koefisien	T	p (sig)	Konfirmasi sig.
DAU	-0,586	-1,072	0,294	Tidak Signifikan
DAK	-1,263	-0,588	0,562	Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk	0,434	1,496	0,147	Tidak Signifikan
Luas Wilayah	33,162	3,475	0,002	Signifikan

Ajusted R Square = 0,479 F = 5,753 p(sig) = 0,002 Konstanta = 356.854,035

$$Y = 356.854,035 - 0,586X_1 - 1,263X_2 + 0,434X_3 + 33,162X_4 + e$$

Sumber: Hasil Pengolahan dari Output Hasil Pengolahan SPSS 17

Dari pengujian statistik menunjukkan Nilai F hitung sebesar  $5,753 > F_{tabel}$  sebesar 2,74 ini berarti menolak  $H_0$  atau menerima  $H_A$  atau dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$ . Hal ini berarti secara simultan ada pengaruh DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,479 atau 47,9% artinya pengaruh DAU, DAK, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 47,9% sisanya sebesar 52,1% dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Penelitian ini mendukung penelitian Meianto (2015) yang menyatakan DAU, DAK, PAD dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal. Demikian juga penelitian Darmayasa (2014) menyatakan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK dan Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa  $t$  hitung DAU sebesar -1,072 berada di daerah penerimaan  $H_0$  sehingga  $H_A$  ditolak, kesimpulannya DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai koefisien dan  $t$  hitung adalah negative sehingga DAU tidak berpengaruh negative terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah

menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Berdasarkan data dan hasil kajian yang ada, seringkali ditemukan fakta bahwa Realisasi Belanja Modal pada APBD di akhir tahun seringkali di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Disamping itu, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalokasikan porsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.

Sebagai perbandingan, beberapa hal yang cukup memprihatinkan justru terlihat bahwa ternyata yang mengalami pelampauan target belanja (dari pagu anggaran induk) cukup tinggi adalah Belanja Pegawai Tidak Langsung, atau biasa orang awam menyebutnya sebagai "Gaji PNSD". Komponen Gaji PNSD tingkat penyerapannya pada realisasi APBD 2011 mencapai 110,60% (realisasi Rp224,95 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp 203,39 triliun). Sementara itu belanja modal realisasinya hanya mencapai

95% dari anggaran induk, atau masih kurang Rp5,4 triliun dari anggaran.seringkali ditemukan fakta bahwa RealisasiBelanja Modal pada APBD di akhir tahun seringkali di bawah targetatau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Disampingitu, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalokasikanporsi belanja pegawai yang lebih besar dari alokasi belanja modal untukpelayanan publik (DJPk, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan Meianto (2015), Tuasikal (2008), Sugiardi dan Supadmi (2014), Oemar (2014), Darmayasa (2014) serta Wertianti dan Dwirandra (2013) yang menyatakanDAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung Dana Alokasi Khusus sebesar -0,588 berada di antara -2,055 dan 2,055 sehingga menerima hipotesis nol, kesimpulannya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai koefisien dan t hitung adalah negatif sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh negatif

terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Rendahnya realisasi Belanja Modal di daerah khususnya yang didanai dari DAK tidak hanya disebabkan oleh kurang berjalannya fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah dengan baik, namun juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terutama yang terkait dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran, mekanisme transfer ke daerah, dan penetapan petunjuk teknis DAK yang terlambat sehingga mempengaruhi penyelesaian pekerjaan di daerah. Penganggaran dan perencanaan DAK dipengaruhi oleh petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Menteri Teknis terkait. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan *guidance* didalamnya yang terlalu *rigid* akan membatasi daerah dalam menyusun rencana kegiatan/proyek yang dapat didanai dari DAK yang menjadi prioritas daerah sehingga

akan menimbulkan potensi keterlambatan penyelesaian kegiatan/proyek DAK.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmayasa (2014), Tuasikal (2008), Novianto (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Irsyadi (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 11 hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa  $t$  hitung Jumlah Penduduk sebesar 1,496 berada di antara  $t$  tabel yaitu -2,055 dan 2,055 sehingga menerima hipotesis nol, kesimpulannya Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai koefisien dan  $t$  hitung adalah positif sehingga Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Gorahe (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

#### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Tabel 11 hasil uji  $t$  menunjukkan bahwa  $t$  hitung Luas Wilayah sebesar 3,475 lebih besar  $t$  tabel 2,055 atau berada di daerah penolakan  $H_0$  sehingga menerima  $H_A$ , kesimpulannya Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai koefisien dan  $t$  hitung adalah positif sehingga Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maryadi (2014), Meianto (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Dan bertolak belakang dengan penelitian Gorahe (2013) menyatakan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan periode 2012-2013 adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### Saran

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun prioritas belanja modal dan perencanaan yang baik dan pemerintah pusat, perlu memberikan rekomendasi pada internal pemerintah pusat mengenai perbaikan kebijakan transfer ke daerah untuk mempercepat realisasi belanja modal di daerah sehingga Belanja Modal daerah

yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

### DAFTAR RUJUKAN

- BPS, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan 2014*
- , 2015, *Data Series Rakyat Sumatera Selatan 2015*
- DJPK, Kementerian Keuangan RI, 2013, *Laporan Evaluasi Belanja Modal*
- Darmayasa, I Nyoman dan Suandi, I Ketut, *Faktor Penentu Belanja Modal dalam APBD Pemerintah Provinsi*,
- Gorahe, Irdha Anisyah Marsudi, 2013, *Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara*, Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Halim, Abdul, 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problemantika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*, Jakarta: Salemba Empat
- , dan Kusufi, Muhammad Syam, 2014, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*, Jakarta: Salemba Empat
- Meianto, Edy, 2014, *Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*, Skripsi, STIE Multi Data Palembang

Maryadi, 2014, *Pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja*

*Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012*, Skripsi, Universitas Maritim Ali Haji Tanjung Pinang.

Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang *Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

\_\_\_\_\_, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Sudarmadi, Hustianto, 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan*

*Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di*

*Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)*, SNEMA dan Akuntansi), FE Universitas Negeri Padang

Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi, Ni Luh, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli*

*Daerah, Dana Alokasi Umum dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 Hal 477-495

Sumarni, Septaningsih, 2008, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan*

*Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, FE Universitas PGRI Yogyakarta

Novianto, Riko dan Hanafiah, Rafiudin, 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana*

*Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Ekonomi Vol 4 No 1 Jan-Juni, Hal 1-22

Tuasikal, Askam, 2008, *Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal*

*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 1 No 2, Juli, Hal 142-155

Wertianti, IGA Gede dan Dwirandra, AANB, 2013, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*

*terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana*

*Alokasi Umum sebagai variabel  
Moderasi Kabupaten/Kota Provinsi  
Bali, E-Jurnal Akuntansi*

Universitas Udayana Vol.4.3 Hal  
567-584